

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang selama ini dihadapi diberbagai daerah. Kemiskinan juga merupakan masalah yang kompleks dan relatif di setiap kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan individu-individu dan masyarakat di suatu daerah masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal tersebut tercermin dalam daya beli masyarakat dan pendapatan masyarakat yang rendah dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

Reformasi sistem pemerintahan daerah melalui instrumen Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menuntut implementasi pemerintahan dan pembangunan daerah di Indonesia harus mempercepat terwujudnya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui proses pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu, meningkatkan daya saing daerah dan memperkecil disparitas ketimpangan ekonomi antardaerah terutama antara Jawa dan luar Jawa atau antara kawasan barat dan timur Indonesia dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan penegasan bahwa, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintahan Daerah, perlu diatur secara adil dan selaras (Anonim, 2004)

Berdasarkan permasalahan kemiskinan di kabupaten Hamahera Selatan, diperlukan penelitian yang lebih spesifik dengan ruang lingkup yang lebih fokus membahas pengaruh variabel Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, serta Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang menyebabkan kemiskinan. Selain itu, berdasarkan keempat variabel tersebut tentunya mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan sehingga penelitian ini berfokus pada analisis di wilayah Halmahera Selatan.

Upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Halmahera Selatan terus dilakukan pemerintah daerah setempat melalui berbagai kebijakan. Dari sisi penawaran agregat, pemerintah daerah setempat mendorong peningkatan investasi dan perluasan kesempatan kerja di semua sektor dengan tujuan dapat mengurangi angka kemiskinan di daerah. Akan tetapi, tingkat kemiskinan belum dapat teratasi. Dilihat dari jumlah penduduk miskin menurut kabupaten kota yang terus mengalami fluktuasi dari tahun 2017-2023, seperti yang pada tabel dibawah ini;

Wilayah	Presentase Penduduk Miskin Menurut Kabpaten/Kota (Persen)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Halmahera Barat	8,74	8,74	8,59	8,82	8,95	8,43	8,74
Halmahera Tengah	14,15	13,94	14,12	13,56	13,52	12,00	11,44
Kepulauan Sula	8,59	8,89	8,98	8,35	8,23	7,64	8,17
Halmahera Selatan	4,10	4,80	5,03	5,21	5,19	4,99	5,68
Halmahera Utara	4,22	4,51	4,55	4,45	5,22	4,58	4,62
Halmahera Timur	15,25	15,02	15,39	15,45	15,04	13,14	12,47
Pulau Morotai	7,07	7,16	7,27	6,46	6,52	5,42	5,38
Pulau Taliabu	7,17	7,35	7,53	7,30	7,49	6,88	7,31

Ternate	2,73	3,00	3,14	3,46	3,55	3,11	3,39
Tidore Kepulauan	5,45	5,95	6,10	6,52	6,58	5,99	6,35
Maluku Utara	6,35	6,64	6,77	6,78	6,89	6,23	6,46

Sumber; BPS Maluku Utara 2024

Penekanan yang sangat kuat pada aspek kesejahteraan serta prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan ini dilandasi fakta historis di masa lalu bahwa, sumber daya alam yang melimpah di luar Jawa dieksploitasi habis-habisan, tetapi dampak ekonomis regional bagi masyarakat di daerah tidak sepadan dengan yang terjadi di Pulau Jawa. Pandangan laten yang demikian telah lama berkembang yang menurut (Majidi 1994), dari sudut pandang wawasan nusantara adalah berbahaya karena cenderung tidak mempercayai proses distribusi ekonomi nasional yang adil dan proporsional antardaerah, bahkan yang lebih radikal lagi diterjemahkan oleh sekelompok masyarakat menjadi proses pembangkangan terhadap eksistensi pemerintahan nasional dalam bentuk pergelaran gerakan politik.

Paradigma penyelenggaraan sistem pemerintahan dan pembangunan daerah berdasarkan Undang-undang Otonomi Daerah yang Baru merupakan sebuah pilihan sistemik bentuk tata pemerintahan daerah yang memiliki konsekuensi politik dan ekonomi jangka panjang bagi segenap unsur pemerintah dan masyarakat dalam menjawab tuntutan kesejahteraan, demokratisasi, pemerataan dan keadilan (Hatari, 2006). Di satu pihak praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah harus mempertimbangkan sinergisme antara kepentingan pemerintah pusat dan daerah, sementara di pihak lain, harus tetap mengedepankan tanggung jawab untuk memenuhi kepentingan publik. Dengan

demikian, tugas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan kini dan di masa mendatang adalah semakin berat, karena selain harus mengemban misi pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat di daerah. Di samping itu juga, harus mengakomodir dinamika dan tuntutan masyarakat yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Salah satu misi yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Halmahera Selatan adalah untuk mempercepat proses akselerasi pembangunan daerah dalam mendorong peningkatan taraf hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat agar tingkat kemiskinan dapat teratasi. Tugas dan tanggung jawab tersebut harus dilakukan pemerintah daerah melalui pengelolaan pembangunan ekonomi, penguatan sumber daya manusia, pengurangan jumlah pengangguran dengan memperluas lapangan pekerjaan. Karena taraf hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan, maka arah, orientasi, strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi daerah harus ditujukan pada upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Jika pertumbuhan ekonomi daerah dapat didorong pada tingkat yang diharapkan maka upaya meningkatkan taraf hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat pun dapat pula diwujudkan.

Kemiskinan dilihat sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan, serta bukan makanan yang diukur sebagai sisi pengeluaran. Jadi, kemiskinan terjadi sebab terbatasnya daya beli

Masyarakat yang tak memiliki uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti kebutuhan pakaian, pangan, serta papan yang mereka butuhkan.

Upaya pengentasan kemiskinan sudah menjadi tujuan pembangunan yang fundamental di setiap daerah, sebagai akibatnya menjadi sebuah alat ukur untuk menilai efektifitas berbagai jenis program pembangunan. Pemerintah daerah telah berupaya melaksanakan aneka macam kebijakan serta program-program penanggulangan kemiskinan, tetapi masih jauh berasal induk persetujuan. Kebijakan dan *aplication* yang dilaksanakan belum menunjukan yang akan terjadi yang gold standard. Masih terjadi kesenjangan antara planing dua dan pencapaian tujuan sebab kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi di application sektoral. Oleh karena itu diperlukan suatu seni manajemen penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan bersinergi sehingga dapat merampungkan dilema secara tuntas karena persetujuan kemiskinan artinya bulat kemiskinan. (Jhingan 2006)

Secara Administrasi Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), dibentuk 25 Febaruari 2003. Pada awal berdirinya, Kabupaten Halmahera Selatan terdiri dari sembilan kecamatan yaitu Kecamatan Bacan, Kecamatan Bacan Timur, Kecamatan Bacan Barat, Kecamatan Pulau Makaeng, Kecamatan Kayoa, Kecamatan Obi, Kecamatan Obi Selatan, Kecamatan Gane Barat dan Kecamatan Gane Timur. Pada tahun 2007 dengan terbitnya Perda No. 8 Tahun 2007 kecamatan-kecamatan induk tersebut dimekarkan menjadi 30 Kecamatan.

Pembangunan ekonomi di Maluku Utara tidak terlepas dari masalah kemiskinan. Dari data Badan Pusat Statistik, masalah kemiskinan di Maluku

Utara terletak pada beberapa kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku Utara, terutama di Kabupaten Halmahera Selatan. Hal ini menunjukkan selama ini pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara hanya dirasakan oleh golongan masyarakat tertentu dan tidak merata ke semua masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan kapasitas dalam jangka panjang di suatu daerah untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas dipengaruhi dengan kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional, dan ideologis terhadap tuntutan keadaan yang tertentu. Kuznets sangat menekankan pada perubahan dan penemuan teknologi sebagai cara menaikkan pertumbuhan produktivitas terkait dengan redistribusi tenaga kerja dari sektor yang kurang produktif (yaitu pertanian) ke sektor yang lebih produktif yaitu industri manufaktur.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan adalah hubungan yang kompleks dan kontroversional. Secara umum, pertumbuhan ekonomi adalah prakondisi bagi pengurangan kemiskinan. Namun ini tidaklah cukup, berbagai studi telah mencoba menganalisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan yang secara metodologi dapat dikelompokkan menjadi dua. Kelompok pertama berfokus pada hubungan antara kemiskinan, pertumbuhan pendapatan dan distribusi pendapatan. (Berardi, 2015). Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat krusial dalam menilai kinerja dalam suatu perekonomian, terutama buat melakukan analisis tentang akibat pembangunan ekonomi yang sudah dilaksanakan suatu Negara atau suatu daerah. pertumbuhan ekonomi merupakan duduk perkara

perekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan aktivitas pada perekonomian yang mengakibatkan barang serta jasa yang diproduksi pada warga bertambah serta kemakmuran rakyat menjadi semakin tinggi. Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi berasal perkembangan suatu perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah pertambahan pendapatan warga secara holistik yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan semua nilai tambah (value edit) yang terjadi. Perhitungan pendapatan daerah yang awalnya didesain pada harga berlaku agar dapat melihat pertambahan dari satu kurun waktu ke ke waktu tertentu agar berikutnya dapat dinyatakan dengan nilai riil, yang dinyatakan dalam harga konstan. Pendapatan wilayah mendeskripsikan balas jasa bagi factor-faktor produksi beroperasi yang di daerah tadi (tanah, kapital, tenaga kerja dan teknologi), yang secara kasar dapat menggambarkan kemakmuran wilayah tadi. Kemakmuran suatu daerah selain dipengaruhi oleh nilai tambah yang tercipta pada daerah tersebut pula oleh seberapa besar terjadi transfer payment yaitu bagian pendapatan yang mengalir keluar wilayah atau menerima aliran dana asal luar wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan jumlah produksi suatu perekonomian atau perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan dan diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional pada periode tertentu. Adapun menurut Shumpeter. Pertumbuhan ekonomi artinya pertambahan output (pendapatan nasional) yang ditimbulkan oleh pertambahan alami berasal tingkat pertambahan penduduk serta taraf tabungan. Sedangkan menurut beberapa ahli ekonomi

pembangunan, pertumbuhan ekonomi merupakan istilah bagi negara yang maju buat menyebut keberhasilan pembangunannya, sementara itu buat negara yang sedang berkembang digunakan kata pembangunan ekonom. (Shumpeter, 2010)

Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan kapasitas dalam jangka panjang di suatu daerah yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang produksi pada penduduknya. Kenaikan kapasitas dipengaruhi oleh kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional, serta ideologis terhadap tuntutan keadaan yang ada. Kuznets sangat menekankan pada perubahan serta inovasi teknologi menjadi cara menaikkan pertumbuhan produktivitas terkait dengan redistribusi tenaga kerja dari sektor yang kurang produktif (yaitu pertanian) ke sektor yang lebih produktif (yaitu industri manufaktur).

Indeks pembangunan manusia merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur pembangunan ekonomi suatu daerah, yang mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk, yaitu kesehatan, tingkat pendidikan dan indikator ekonomi. Oleh sebab itu, manusia merupakan kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Indeks pembangunan manusia berperan krusial dalam pembangunan perekonomian terbaru karena pembangunan manusia yang baik dapat memberikan faktor-faktor produksi bisa lebih maksimal. Mutu penduduk yang baik akan lebih muda berinovasi menyebarkan faktor faktor produksi. Pembangunan manusia yang tinggi menyebabkan jumlah penduduk akan tinggi juga sebagai akibatnya akan mempertinggi tingkat konsumsi. Oleh karena itu pembangunan manusia dengan perkembangan perekonomian rakyat sangat erat kaitannya serta merupakan prasyarat tercapainya pembangunan manusia yang

berkualitas, karena peningkatan pembangunan ekonomi akan mendukung peningkatan produktivitas melalui pengisian kesempatan kerja dengan usaha perjuangan produktif sehingga terciptanya peningkatan pendapatan. Hubungan atas bawah antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan insan menunjukkan bahwa melalui upaya pembangunan insan berkemampuan dasar dan berketerampilan tenaga kerja termasuk petani, pengusaha dan manajer akan meningkat. Hal ini akan mempermudah dalam menaikkan perekonomian masyarakat.

Salah satu manfaat utama IPM adalah untuk memberikan bahwa suatu daerah sesungguhnya bisa berkinerja jauh lebih baik sekalipun tingkat pendapatannya rendah. Kebalikannya, tingkat pendapatan yang tinggi tidak selamanya diikuti dengan capaian pembangunan manusia yang tinggi juga. IPM memberikan bahwa perbedaan pada pendapatan lebih besar dibandingkan menggunakan disparitas indikator pada pendapatan lainnya, paling tidak pada bidang kesehatan dan pendidikan. Selain itu, IPM mengingatkan kita bahwa pembangunan yang sesungguhnya berarti pembangunan insan dalam arti luas, bukan sekedar pendapatan yang lebih tinggi. Kesehatan serta pendidikan ialah input bagi fungsi produksi nasional pada perannya sebagai komponen modal manusia. Peningkatan kesehatan dan pendidikan merupakan tujuan tersendiri yang penting asal upaya pembangunan.

Komposisi IPM berdasarkan tiga indikator yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup (daya beli) atau pendapatan. Peningkatan pendidikan seorang seringkali dikaitkan dengan peningkatan pendapatan atau upah yang diperoleh.

Bila upah mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak orang yang mempunyai taraf pendidikan tinggi juga pengalaman pembinaan, meningkat produktivitasnya serta hasilnya ekonomi nasional akan tumbuh lebih tinggi. Di samping pendidikan, kesehatan juga mempunyai peranan penting terhadap pertambahan pendapatan, dampak kesehatan terhadap pendapatan diantaranya menggunakan perbaikan kesehatan penduduk akan meningkatkan partisipasi angkatan kerja. Perbaikan kesehatan bisa pula membawa pemugaran pada taraf pendidikan dan pengembangan potensi diri yang kemudian menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dengan meningkatnya pendapatan. (Lumbantoruan dan Hidayat, 2014)

Kondisi IPM yang rendah mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang rendah serta menjadikan rendahnya produktivitas sebagai akibatnya akhirnya berimplikasi juga pada hilangnya kesempatan kerja dan pendapatan. Jika pendapatan rakyat hilang maka mengakibatkan masyarakat sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Hal ini ibarat lingkaran setan kemiskinan yang sulit untuk dihindari.

Penelitian yang dilakukan oleh Ari Kristin serta Sulia Sukmawati Pengolahan datanya menggunakan metode analisis jalur memakai perangkat lunak WarpPLS lima.0. yang akan terjadi penelitian ini membagikan bahwa IPM berpengaruh secara eksklusif dan negatif terhadap taraf kemiskinan dengan nilai koefisien jalur -0.71.

Tingkat Pengangguran Terbuka bisa dikatakan sebagai perbedaan antara penggunaan tenaga kerja dengan jumlah angkatan kerja. Sementara itu, istilah

pengangguran terbuka merupakan keadaan seseorang tidak mempunyai pekerjaan dan dalam keadaan pencarian kerja, orang tanpa pekerjaan dan sedang menyiapkan usaha, orang tanpa pekerjaan dan tidak dalam proses pencarian kerja, termasuk juga orang dengan pekerjaan dan belum memulai kerja. Adapun tabel Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara periode 2017-2023.

Wilayah	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota (Persen)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Halmahera Barat	53,18	3,26	3,39	3,26	3,26	3,45	3,77
Halmahera Tengah	45,08	4,59	4,10	6,74	4,23	3,06	3,95
Kepulauan Sula	45,31	5,34	4,93	4,90	2,78	2,10	2,67
Halmahera Selatan	52,28	4,08	4,58	4,40	1,94	1,51	2,44
Halmahera Utara	43,41	5,01	4,89	6,49	8,01	6,06	6,53
Halmahera Timur	56,11	3,58	4,48	5,21	6,78	5,20	4,66
Pulau Morotai	48,25	5,98	4,92	4,70	6,27	4,35	4,56
Pulau Taliabu	56,15	5,48	4,79	4,75	6,10	4,17	3,15
Ternate	43,65	5,91	6,06	5,80	5,70	5,77	6,62
Tidore Kepulauan	45,50	4,97	4,65	4,95	2,81	2,85	3,52
Maluku Utara	66,43	4,77	4,97	5,15	4,71	3,98	4,31

Sumber; BPS Maluku Utara 2024

Tingkat pengangguran terbuka adalah orang-orang yang membutuhkan pekerjaan, berusaha mencari pekerjaan baru namun belum memiliki pilihan untuk melacaknnya. Di negara mana pun di planet ini, baik yang tergolong negara berkembang atau negara berkembang, mereka umumnya berurusan dengan

masalah pengangguran, yang penting adalah negara agraris tidak dapat memberikan keuntungan kepada penduduknya yang menganggur.

Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang tidak atau belum mendapatkan pekerjaan. Artinya, pengangguran terbuka adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi belum memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Pengangguran terjadi akibat dari kurangnya permintaan tenaga kerja dibandingkan dengan jumlah pekerja yang menawarkan tenaga kerjanya pada tingkat upah dan harga yang sedang berlaku. (Mahsunah, 2013)

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) menjadi salah satu tolak ukur yang kerap digunakan dalam melihat dampak dari partisipasi penduduk usia kerja itu sendiri dalam kontribusinya di lingkup kegiatan ekonomi. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dapat diartikan sebagai alat perbandingan pada penduduk yang ada dalam kegiatan ekonomi atau disebut juga sebagai angkatan kerja (sedang bekerja atau mencari pekerjaan) terhadap keseluruhan penduduk yang tergolong dalam kriteria usia kerja. Dalam segi kategori pemuda, TPAK ialah proporsi dari pemuda (penduduk dengan usia 16-30 tahun) yang terdapat dalam rangkaian kegiatan ekonomi tersebut. (Meyvi, dkk. 2020)

Berikut merupakan data jumlah Tingkat Partisipasi Angkata Kerja menurut Kabupaten/Kota di provinsi Maluku Utara periode 2017-2023.

Wilayah	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota (Persen)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Halmahera Barat	53,18	65,30	63,04	64,66	64,88	70,21	68,09
Halmahera Tengah	45,08	65,23	65,17	68,77	63,02	70,81	70,77

Kepulauan Sula	45,31	64,91	64,80	59,44	63,76	58,29	62,38
Halmahera Selatan	52,28	72,71	69,93	68,25	68,87	67,43	73,24
Halmahera Utara	43,41	61,65	58,50	61,98	64,39	66,88	69,86
Halmahera Timur	56,11	73,31	66,89	66,18	64,80	68,08	70,55
Pulau Morotai	48,25	62,09	66,48	63,54	67,71	65,93	64,72
Pulau Taliabu	56,15	73,75	74,43	72,65	69,23	61,56	63,11
Ternate	43,65	57,48	61,06	59,88	59,58	58,90	61,20
Tidore Kepulauan	45,50	65,16	65,11	67,06	66,23	65,35	68,72
Maluku Utara	66,43	65,21	64,49	64,28	64,70	64,88	67,77

Sumber; BPS Maluku Utara 2024

Menurut Badan Pusat Statistik Persentase individu yang bekerja ataupun mencari pekerjaan di pasar tenaga kerja dikenal sebagai tingkat partisipasi angkatan kerja, yang memperlihatkan proporsi tenaga kerja yang tersedia untuk bekerja di berbagai industri. Distribusi penduduk yang aktif dengan ekonomi diprofilkan oleh pengelompokan angkatan kerja berdasarkan jenis kelamin serta kelompok umur. TPAK biasanya digunakan untuk menunjukkan proporsi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif dengan ekonomi disebuah negara atau kawasan serta ketersediaan tenaga kerja untuk produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Perbandingan jumlah penduduk pada angkatan kerja dengan jumlah penduduk dalam kelompok usia kerja tersebut disebut tingkat partisipasi kerja atau angkatan kerja. (Murianti & Romanda 2020)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah menggambarkan jumlah angkatan kerja dalam suatu kelompok umum sebagai presentase penduduk dalam kelompok umur tersebut. Partisipasi Angkatan Kerja terendah terjadi pada kelompok penduduk wanita yang berada pada usia kerja dan penduduk usia muda. (Octaviany, 2016)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah besaran terhadap keseimbangan penduduk yang termasuk dalam usia kerja dipasar tenaga kerja, yang bekerja maupun mencari pekerjaan, yang memberikan persediaan terhadap para kerja dalam mengelola hasil alam yang ada. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan jumlah penduduk yang dikatakan angkatan kerja dalam kumpulan tertentu untuk membandingi kelompok umur tersebut. Sehingga disimpulkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah seseorang dalam usia bekerja yang terdapat dalam pasar yang mampu mengolah barang dan jasa dalam suatu kegiatan sehari-hari guna untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik lagi demi tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat. TPAK mengukur proporsi penduduk yang berpotensi bekerja dan memperlihatkan seberapa besar persentase tenaga kerja yang tersedia di suatu negara atau wilayah. Semakin tinggi TPAK, semakin besar jumlah tenaga kerja yang tersedia untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan semakin besar pula potensi produksi barang dan jasa yang dapat dihasilkan. (Putriana & Syah Aji, 2022)

Angkatan kerja adalah penduduk yang berada pada usia kerja yang bekerja, memiliki pekerjaan namun sedang tidak bekerja (cuti, sakit, dsb), maupun pengangguran. TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) memperlihatkan sebuah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang secara aktif terlibat dalam pasar tenaga kerja baik yang tengah mencari pekerjaan maupun yang bekerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) bisa dinyatakan untuk semua tenaga

kerja yang tersedia atau jumlah tenaga kerja berdasarkan suatu kelompok desa-kota, tingkat pendidikan, dan jenis kelamin. (Rahmani, 2021)

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, terhadap Indeks Pembangunan Manusia ?
2. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Halmahera Selatan periode 2017-2023.
2. Menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Kabupaten Halmahera Selatan periode 2017-2023.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik dari aspek teoritis maupun aspek praktis, diantaranya:

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana, informasi, dan kajian tentang kemiskinan di kabupaten Halmahera Selatan.
2. Hasil ini diharapkan menjadi bahan referensi dan memberikan pengetahuan bagi mahasiswa atau pihak lain yang ingin melakukan penelitian sejenis.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi tentang penyebab kemiskinan di kabupaten Halmahera Selatan serta dapat digunakan sebagai alternatif pertimbangan untuk menyusun kebijakan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di kabupaten Halmahera Selatan.